



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1129, 2021

KEMENDESA-PDPT. Pola Klasifikasi Arsip.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola

- Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1051);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1051) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG POLA KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

RINCIAN LENGKAP POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. BENTUK DAN SUSUNAN
- B. CARA PENGGUNAAN

BAB II KLASIFIKASI ARSIP

- A. KODE KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF
- B. KODE KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

BAB III PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. BENTUK DAN SUSUNAN

1. Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi/kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dan dibagi menjadi 3 (tiga) perincian dasar. Perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga merupakan pola dasar yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kode masalah yang tercantum dalam Pola Klasifikasi.
3. Untuk membedakan rincian pertama, kedua dan ketiga dipergunakan kode huruf dan angka. Huruf adalah kode rincian pertama (masalah primer), angka pertama merupakan kode rincian kedua (masalah sekunder) dan angka kedua merupakan kode rincian ketiga (masalah tertier).

B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami Klasifikasi Arsip harus memahami rincian pertama, kedua dan ketiga serta memahami hubungan antara masalah dengan sub masalah dan sub-sub masalahnya.
2. Tiap kode sub masalah dan sub-sub masalah merupakan rincian dari pokok masalah. Contoh:
UMM : Kode rincian pertama/masalah primer Umum
00 : Kode rincian kedua/masalah sekunder dari Kearsipan
0 4 : Kode rincian ketiga/masalah tertier dari yaitu Layanan Arsip
Dari contoh di atas dapat diartikan bahwa kode UMM.00.04 adalah naskah dinas yang berkenaan dengan Layanan Peminjaman dan Penggunaan Arsip mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan
3. Untuk dapat menentukan Kode Klasifikasi suatu arsip secara tepat harus dipahami masalah yang terkandung dan dari sudut pandang mana masalah itu disajikan.

4. Arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah harus ditetapkan masalah yang lebih utama dikaitkan dengan tugas dan fungsi unit kerja yang mendayagunakan arsip.
5. Klasifikasi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari 17 (tujuh belas) pokok masalah, yang terdiri dari kegiatan Fasilitatif dan Substantif yang mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi baik di Pusat maupun di UPT, yaitu:

KEGIATAN FASILITATIF (9 pokok masalah)

a.	KEUANGAN	kode KEU
b.	KEPEGAWAIAN	kode KPG
c.	PERENCANAAN	kode PRC
d.	HUKUM	kode HKM
e.	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	kode OTL
f.	UMUM	kode UMM
g.	PENGADAAN BARANG DAN JASA	kode PBJ
h.	HUMAS	kode HMS
i.	PENGAWASAN	kode PWS

KEGIATAN SUBSTANTIF (8 pokok masalah)

a.	KEBIJAKAN	kode BIJ
b.	PROGRAM PRIORITAS	kode PRI
c.	PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN	kode PDP
d.	PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	kode PEI
e.	PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	kode PDT
f.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	kode PKT
g.	PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	kode BPI

- h. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI kode SDM

BAB II
KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

1. KEU KEUANGAN

- 00 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBN-P
 - 01 Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara
 - 02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Komisi DPR-RI
 - 03 Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI
 - 04 Ketetapan Pagu Definitif
 - 05 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 - 06 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Termasuk Revisinya
- 01 Pelaksanaan Anggaran
 - 01 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
 - 02 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Masing-masing Satker
 - 03 Laporan Pelaksanaan Anggaran
- 02 Belanja
 - 01 Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GU)
 - 02 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 03 Pembukuan Anggaran
 - 04 Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
 - 05 Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
- 03 Bantuan / Pinjaman Luar Negeri
 - 01 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (*Blue Book*)
 - 02 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (*Grey Book*)

- 03 Dokumen *Memorandum Of Understanding* (MoU) dan Dokumen Sejenisnya
- 04 Dokumen *Loan Agreement* (PHLN)
- 05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri
- 06 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)
- 07 Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)
- 08 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri
- 09 Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor (*Replenishment*)
- 10 Laporan Kemajuan, Bulanan, dan Triwulan (*Report Progress, Monthly, dan Quarterly*)
- 11 Laporan Penyelesaian/Laporan Tahunan (*Completion Report/Annual Report*)
- 12 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
- 04 Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri
 - 01 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - 02 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang/Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - 03 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan.
 - 04 Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penetapan Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Barang
 - 05 Keputusan Penetapan Pengelola Keuangan Kementerian/ Unit Kerja
 - 06 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Bendahara Pembantu termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan

- 05 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
 - 01 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
 - 02 Register Transaksi Harian (RTH), Dokumen Sumber (DS), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 03 Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/ Semester
- 06 Pertanggungjawaban Keuangan Negara
 - 01 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 - 02 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal
 - 03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
Naskah dinas yang berkaitan dengan laporan aparat pemeriksa fungsional seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP), dan Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP
 - 04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara
Naskah dinas yang berhubungan dengan penyelesaian kerugian keuangan negara, termasuk di dalamnya Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
 - 05 Gagal Bayar
- 07 Akuntansi dan Pelaporan
 - 01 Verifikasi dan Pembukuan Keuangan
 - 02 Akuntansi dan pelaporan keuangan (triwulan, semester, dan Tahunan)
- 08 Perbendaharaan dan penatausahaan keuangan
 - 01 Daftar Gaji, Lembur dan Uang Makan
 - 02 Kartu Gaji
 - 03 Surat Setoran Pajak (SSP)
 - 04 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
 - 05 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
 - 06 Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank
 - 07 Laporan Kas
 - 08 Piutang

- 09 Hutang
- 09 Barang Milik Negara (BMN)
 - 01 Rencana Kebutuhan BMN
 - 02 Inventarisasi BMN
 - 03 Pengelolaan BMN
 - 04 Penghapusan/hibah BMN
 - 05 Berita Acara Serah Terima BMN
 - 06 Laporan BMN
 - 07 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi BMN
 - 08 Surat Teguran Kelalaian Pemanfaatan BMN
- 10 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 01 Usulan Tarif PNBP
Naskah dinas yang berkaitan dengan penetapan tarif PNBP baik ke Kementerian Keuangan maupun internal
 - 02 Kontrak/Perjanjian Sewa PNBP
 - 03 Penagihan/Pengembalian PNBP
 - 04 Prosedur Pengelolaan dan Pelaporan PNBP
 - 05 Keringanan/Keberatan Pembayaran PNBP
 - 06 Pemeriksaan dan Pengawasan PNBP
 - 07 Sanksi/Denda PNBP

2. KPG KEPEGAWAIAN

- 00 Formasi Pegawai
 - 01 Usulan dari Unit Kerja
 - 02 Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan RB dan Kepala BKN
 - 03 Persetujuan MenPan dan RB
 - 04 Penetapan Formasi PNS
 - 05 Penetapan Formasi Khusus
- 01 Penerimaan/Pengadaan Pegawai Negeri
 - 01 Proses Penerimaan Pegawai
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, keputusan hasil ujian dan wawancara
 - 02 Penetapan Pengumuman Kelulusan
 - 03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima

- 04 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP
Naskah dinas yang meliputi surat lamaran, ijazah, SKCK, kartu kuning dan surat keterangan kesehatan
 - 05 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 (dua) Tahun
 - 06 Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif
- 02 Pembinaan Karir Pegawai
- 01 Diklat/ Kursus/ Tugas Belajar/ Ujian Dinas/ Izin Belajar Pegawai
Naskah dinas yang berkaitan dengan surat perintah/surat tugas/surat keputusan/surat izin dan laporan kegiatan pengembangan diri
 - 02 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPL)/ Sertifikat
 - 03 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Standar Kinerja Pegawai (SKP)
 - 04 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
 - 05 Berkas Disiplin Pegawai
Naskah dinas yang meliputi daftar hadir, rekapitulasinya dan hukuman disiplin.
 - 06 Penghargaan dan Tanda Jasa
 - 07 Satyalencana Karya Satya
 - 08 Pengembangan karir
- 03 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
- 04 Mutasi Pegawai
- 01 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar-Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar-Unit
 - 02 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
 - 03 Mutasi Keluarga
 - 04 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
 - 05 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)
 - 06 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai

- 07 Peninjauan Masa Kerja
- 08 Berkas Baperjakat
- 09 Pelantikan Jabatan
- 05 Administrasi Pegawai
 - 01 Cuti Besar
 - 02 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
 - 03 Cuti Alasan Penting
 - 04 Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
 - 05 Dokumentasi Identitas Pegawai
 - Naskah dinas yang berkaitan usul penetapan karpeg/KPE/karis/karsu, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P) dan keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4)
 - 06 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
 - 07 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
 - 08 Berkas Pengurusan Tunjangan Jabatan
 - 09 Berkas Pengurusan Tunjangan Kinerja
 - 10 Sistem Informasi Kepegawaian
 - 11 Pernyataan tidak sedang menjalani proses atau pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - 12 Keterangan Kerja
 - 13 Data Pegawai
- 06 Kesejahteraan Pegawai
 - 01 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
 - 02 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
 - 03 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
 - 04 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
 - 05 Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
 - 06 Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal karena Dinas
 - 07 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
 - 08 Berkas tentang Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
 - 09 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi

- 10 Berkas tentang Perayaan Hari Besar Nasional/Keagamaan
- 11 Berkas tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
- 07 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun
- 08 Perselisihan/Sengketa Pegawai
- 09 Usul Pemberhentian Dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya dan PNS Yang Meninggal
- 10 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil
 - 01 Berkas Lamaran yang Diterima
 - 02 Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya
 - 03 Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN
 - 04 S.K. Pengangkatan CPNS
 - 05 Hasil Pengujian Kesehatan
 - 06 S.K. Pengangkatan PNS
 - 07 S.K. Peninjauan Masa Kerja
 - 08 S.K. Kenaikan Pangkat
 - 09 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan
 - 10 S.K.Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Fungsional (umum dan tertentu)
 - 11 S.K.Perpindahan Wilayah Kerja
 - 12 S.K. Perpindahan antar-Instansi
 - 13 S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
 - 14 Berita Acara Pemeriksaan
 - 15 S.K.Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS
 - 16 S.K.Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk
 - 17 S.K.Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan
 - 18 S.K.Pemberian Uang Tunggu
 - 19 S.K.Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara
 - 20 SK. Pengalihan PNS
 - 21 S.K.Pemberhentian sebagai PNS
 - 22 S.K.Pemberhentian Sementara
 - 23 Surat Keterangan Pernyataan Hilang

- 24 Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang
- 25 S.K.Penggantian Nama
- 26 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran
- 27 Akta Nikah/Cerai
- 28 Akta Kelahiran
- 29 Isian Formulir PUPNS
- 30 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan
- 31 Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Politik
- 32 Surat Keterangan Mutasi Keluarga
- 33 Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang
- 34 Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
- 35 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
- 36 Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus
- 37 Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
- 38 Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri
- 39 Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri
- 40 Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS
- 41 Ijasah/Sertifikat
- 42 S.K.Penempatan/Penarikan Pegawai
- 43 S.K.Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk
- 44 Surat Pertimbangan Status PNS
- 45 S.K.Pengaktifan Kembali Sebagai PNS
- 46 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah
- 47 S.K. Pensiun
- 48 Surat Pernyataan Bebas Hutang Piutang
- 11 Berkas Perseorangan Pejabat Negara
- 12 Pegawai Kontrak
 - 01 Proses penerimaan Pegawai Kontrak
Naskah dinas yang berkaitan dengan pengumuman penerimaan, pengumuman seleksi administrasi, pengumuman wawancara, pengumuman akhir penerimaan dan berita acara pelaksanaan penerimaan Pegawai Kontrak

- 02 Kontrak/Perjanjian Kerja Pegawai Kontrak
 - 03 Berkas Perseorangan Pegawai Kontrak
Naskah dinas yang berkaitan dengan personal file
Pegawai Kontrak
 - 04 Pemberhentian Pegawai Kontrak
 - 05 Pengalaman Kerja
 - 13 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
 - 01 Proses Penerimaan
 - 02 Berkas Perseorangan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi
3. PRC PERENCANAAN
- 00 Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
 - 01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ master plan
 - 02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/
Rencana Strategis (Renstra)
 - 03 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional
 - 01 Program Kerja Tahunan
 - 01 Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung
 - 02 Program Kerja Tahunan Unit Kerja
 - 03 Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi
 - 02 Penetapan/Kontrak Kinerja
 - 01 Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
 - 02 Pimpinan Unit Kerja
 - 03 Laporan
 - 01 Laporan Berkala
 - 02 LAKIP
 - 03 Laporan Insidental
 - 04 Evaluasi Program
 - 01 Evaluasi Program Unit Kerja
 - 02 Evaluasi Program Kementerian
4. HKM HUKUM
- 00 Program Legislasi
 - 01 Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari
Kementerian

- 02 Program Legislasi Kementerian
- 01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan
 - 01 Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 02 Rancangan Peraturan Pemerintah
 - 03 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden
- 02 Peraturan Menteri

Naskah dinas yang berkaitan dengan peraturan Menteri sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan
- 03 Keputusan

Naskah dinas yang berkaitan dengan keputusan sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi keputusan

 - 01 Keputusan Menteri
 - 02 Keputusan Pejabat Setingkat Eselon I
- 04 Instruksi

Naskah dinas yang berkaitan dengan instruksi sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi instruksi

 - 01 Instruksi Menteri
 - 02 Instruksi Pejabat Setingkat Eselon I
- 05 Surat Perintah

Naskah dinas yang berkaitan dengan surat perintah sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi peraturan

 - 01 Surat Perintah Menteri
 - 02 Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II
- 06 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/
Internasional

Naskah dinas yang berkaitan dengan standar/pedoman/
prosedur kerja yang menunjang kinerja pegawai di lingkungan
Kementerian maupun masyarakat umum
- 07 Nota Kesepahaman (MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerja Bersama
Naskah dinas yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman
Bersama/ *Memorandum of Understanding*
(MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama/*Letter of Intens* (LoI)
baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri
 - 01 Dalam Negeri
 - 02 Luar Negeri

- 08 Dokumentasi Hukum
 - 09 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
 - 01 Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ Pembinaan Hukum
 - 02 Laporan Hasil Pelaksanaan
 - 10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi
 - 11 Kasus/ Sengketa Hukum
 - 01 Pidana
 - 02 Perdata
 - 03 Tata Usaha Negara
 - 12 Perizinan
 - 13 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 - 01 Hak Cipta
 - 02 Hak Paten
 - 03 Hak Merk
 - 14 Penghargaan Kelembagaan
 - 15 Permohonan Hak yang Ditolak
 - 01 Materi Rancangan Produk Hukum dan Unit Kerja Operasional
 - 02 Proses Pembahasan Materi Produk Hukum di Tingkat Biro
 - 03 Proses Pembahasan Materi Tingkat antar-Departemen/ Lembaga (Lintas Sektor)
 - 16 Surat Edaran

Naskah dinas yang berkaitan dengan surat edaran sejak dalam perancangan hingga ditetapkan menjadi surat edaran

 - 01 Surat Edaran Menteri
 - 02 Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II
5. OTL ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
- 00 Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - 01 Pembentukan
 - 02 Perubahan
 - 03 Pembubaran
 - 01 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
 - 02 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan

Fungsional

- 03 Evaluasi Kementerian
- 04 Analisa Jabatan
- 05 Ketatalaksanaan (SOP)
- 06 Bisnis Proses
- 07 Reformasi Birokrasi
 - 01 Agen Perubahan
 - 02 Zona Integritas
 - 03 Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

6. UMM UMUM

- 00 Kearsipan
 - 01 Administrasi Persuratan

Naskah dinas yang berkaitan dengan urusan surat-menyerut yang terdiri atas pemberitahuan pindah kantor, penambahan nomor telepon, alamat pejabat, spesimen tanda tangan pejabat, cap dinas, stempel draf, penomoran naskah dinas, pengiriman, ekspedisi, dan penyimpanan
 - 02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip

Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan ketatalaksanaan, pengolahan, penyimpanan, analisis nilai guna, pemindahan, perawatan, penyerahan, penyusutan, pemusnahan, dan konservasi, pelacakan arsip, serta penyelamatan arsip vital
 - 03 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
 - 04 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)

Naskah dinas yang berkaitan dengan layanan jasa kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan
 - 05 Penyusutan Kearsipan
 - 06 Pembinaan Kearsipan

Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan
 - 07 Risalah/ Notulen Rapat
 - 08 Audit Kearsipan Eksternal

- 09 Audit Kearsipan Internal
- 01 Kerumahtangaan
 - 01 Pendistribusian
 - 02 Telekomunikasi
 - 03 Administrasi Penggunaan Fasilitas

Naskah dinas yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, wisma, rumah dinas, kendaraan, dan fasilitas kantor lainnya
 - 04 Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi
 - 05 Pengurusan Kendaraan Dinas
 - 06 Pemeliharaan Gedung dan Taman
 - 07 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon, Televisi, Kabel, dan Komputer

Naskah dinas yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik, air, telepon, televisi, kabel, dan komputer
 - 08 Ketertiban dan Keamanan

Naskah dinas yang berkaitan dengan masalah pengamanan dan ketertiban kantor serta rumah dinas.
 - 09 Administrasi Pengelolaan Parkir
 - 10 Administrasi Pakaian Dinas Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya
 - 11 Pelayanan Kesehatan

Naskah dinas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan/poliklinik
- 02 Keprotokolan
 - 01 Penyelenggaraan Acara Kedinasan
 - 02 Buku Tamu
 - 03 Agenda Kegiatan Pimpinan (Menteri, Wakil Menteri dan Eselon I)
 - 04 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
 - 05 Kunjungan Dinas Eksternal/Audiensi
 - 06 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat

7. PBJ PENGADAAN BARANG DAN JASA

00 Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

01 Standarisasi Pengadaan

Naskah dinas yang berkaitan dengan standarisasi pengadaan termasuk SDM, dokumen, peraturan pengadaan barang/jasa, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sarana prasarana pengadaan

02 Rencana Umum Pengadaan

Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan identifikasi dan analisa kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penerapan rencana penganggaran pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, pengumuman rencana pengadaan

03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Naskah dinas yang berkenaan dengan sertifikasi, bimtek, pelatihan dan diklat dan layanan advokasi pengadaan

04 Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sanggah

Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan penanganan permasalahan kontrak, Jasa, barang dan konstruksi dan keterangan ahli terkait pengadaan barang, jasa dan pekerjaan konstruksi

05 Layanan Pengelolaan Pengadaan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengelola pengadaan dan manajemen pengadaan

06 Pengadaan Barang

07 Pengadaan Konstruksi

08 Pengadaan Jasa Konsultasi

09 Pengadaan Jasa Lainnya

01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik

01 Pengadaan Secara Elektronik

Naskah dinas yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui penyedia (dari proses persiapan pengumuman pengadaan, pengumuman pengadaan, penawaran sampai dengan penetapan pemenang) untuk pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

- 02 Naskah dinas yang berkaitan dengan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan.
- 03 Pengadaan Barang
- 04 Pengadaan Konstruksi
- 05 Pengadaan Jasa Konsultasi
- 06 Pengadaan Jasa Lainnya

8. HMS HUMAS

- 00 Dokumentasi/Liputan

Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/fakta kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media meliputi kertas, foto, video, rekaman suara, multimedia serta tukar-menukar dokumentasi
- 01 Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan

Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan publikasi/penyebarluasan informasi seperti publikasi media elektronik, media cetak, naskah berita, poster, *bulletin*, *leaflet*, *booklet*, brosur, dan klipring

 - 01 Kliping Koran
 - 02 Brosur/ *Leaflet*/ poster/ Plakat
 - 03 Pengumuman/Pemberitaan
 - 04 Pengaduan Masyarakat
- 02 Hubungan antar-Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/ Instansi
 - 01 Hubungan antar-Lembaga Pemerintah

Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pemerintah/antar-kementerian
 - 02 Hubungan Organisasi Sosial/ LSM

Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama organisasi sosial, kemasyarakatan atau LSM
 - 03 Hubungan dengan Perusahaan
 - 04 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)

- Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama lembaga pendidikan dan perguruan tinggi
- 05 Forum Kehumasan
 - 06 Hubungan Media Massa
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama media massa (siara pers, konferensi pers, kunjungan wartawan/peliputan), pendapat umum serta pengaduan masyarakat
 - 03 Rapat Kerja/ Dengar Pendapat/ *Hearing* DPR
Naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan dan kerja sama DPR RI (dengar pendapat/*hearing*)
 - 04 Bahan/ Materi Pidato/ Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/ Kabupaten/ Kota
 - 05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal
 - 06 Pameran/ Sayembara/ Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pameran/ sayembara/ lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dan laporan
 - 07 Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan
 - 08 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, dan Bela Sungkawa
 - 09 Pidato/ Sambutan Pimpinan
Naskah dinas yang berkaitan dengan bahan/materi pidato Pimpinan
 - 01 Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
 - 02 Wakil Menteri
 - 03 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 - 10 Kepustakaan
 - 01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka
 - 02 Pengadaan dan Pengolahan Bahan
 - 03 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
 - 04 Preservasi Bahan Pustaka

9. PWS PENGAWASAN

- 00 Rencana Pengawasan
 - 01 Rencana Strategis Pengawasan
 - 02 Rencana Kerja Tahunan

- 03 Rencana Kinerja Tahunan
- 04 Penetapan Kinerja Tahunan
- 05 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional
- 01 Pedoman Kebijakan Pengawasan
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya
- 02 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sampai dengan penetapannya
- 03 Audit
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan audit sejak dalam rancangan sampai dengan menjadi catatan dan laporan
 - 01 Audit Kinerja
 - 02 Audit dengan tujuan tertentu
 - 03 Audit Investigasi
 - 04 *Monthly Audit*
 - 05 Audit Lainnya
- 04 Reviu
Naskah dinas yang berkaitan dengan reviu sejak dalam rancangan sampai dengan menjadi catatan dan laporan
 - 01 Reviu laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan
 - 02 Reviu laporan kinerja
 - 03 Reviu RKA-KL
 - 04 Reviu revisi DIPA/Anggaran
 - 05 PIPK
 - 06 RKBMN
- 05 Evaluasi
Naskah Dinas yang berkaitan dengan evaluasi yang dilaksanakan dilingkup kementerian.
 - 01 SAKIP
 - 02 PMPRB
 - 03 SPIP

06 Pemantauan

naskah dinas yang berkaitan dengan hasil pengawasan

01 Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan

02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan

03 Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

04 Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal

05 Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Internal

06 Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Eksternal

07 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

08 Tuntutan Perbendaharaan

naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi tuntutan perbendaharaan (TPI) /Tuntutan Ganti Rugi (TGR), seperti: Laporan Kehilangan, Berita Acara Kehilangan Barang/Uang, SK Tanggung Jawab Mutlak/Surat Kesanggupan untuk mengganti ke kas Negara, SK Penghapusan Uang dan Barang sampai laporan penyelesaian TP/TGR

07 Pelaksanaan Pengawasan

01 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang Tidak Memerlukan Tindak Lanjut (TL)

02 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut (TL)

03 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat

04 Laporan Pemutakhiran Data

05 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

- 06 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
- 07 *Good Governance*
- 08 Pengawasan Lainnya
 - naskah Dinas yang berkaitan dengan bimbingan teknis, sosialisasi pengawasan, konsultasi pengawasan, koordinasi pengawasan, Pelatihan dikantor sendiri (PKS), meliputi surat penugasan, surat menyurat beserta laporan
- 09 Penerapan *Early Warning System*
 - Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada Unit Kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan
- 10 Penerapan *Internal Audit Capability Model (IACM)*
 - Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan
- 11 Surat Keterangan/Pernyataan Bebas Temuan
- 12 Temuan Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
- 13 Penerapan Peta Risiko Pengawasan/Manajemen Risiko
 - Naskah Dinas yang berkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pemetaan Risiko/Pengelolaan Risiko
- 14 Piagam Pengawasan
- 15 Pemeriksaan Khusus
 - Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan khusus tentang penyelesaian kasus-kasus yang merugikan negara
- 16 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
 - 01 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Perlu Ditindaklanjuti
 - Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang perlu ditindaklanjuti
 - 02 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti

Naskah dinas yang berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khusus yang tidak perlu ditindaklanjuti

- 17 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 18 Satuan Pengawasan Intern (SPI)/ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawasan Intern (SPI)/ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 19 Hasil Analisis Laporan dan Evaluasi Pengawasan
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern dan ekstern pemerintah dan laporan pengawasan lainnya, serta penyusunan hasil analisis dan evaluasi.
- 20 Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
Naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
- 21 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Naskah dinas yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

B. KODE KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

1. BIJ KEBIJAKAN

- 00 Penyiapan Bahan/Proses Penyusunan Kebijakan
Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan bahan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan serta pengumpulan dan pengolahan data
- 01 Penetapan dalam Bentuk Pengaturan berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

2. PRI PROGRAM PRIORITAS**00 Dana Desa**

Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan penyaluran, pedampingan dan pengawasan dana desa

01 Padat karya tunai desa**02 Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa****03 Desa tanggap Covid-19**

Naskah dinas yang berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19

01 Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)**02 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)****03 Embung Desa**

Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi kebutuhan embung, perencanaan pembuatan embung, pelaksanaan pembuatan embung, pelaporan pelaksanaan, dan pengembangan

04 Sarana Olahraga Desa**05 SDGs Desa****01 Desa tanpa kemiskinan****02 Desa tanpa kelaparan****03 Desa sehat dan sejahtera****04 Pendidikan desa berkualitas****05 Desa berkesetaraan gender****06 Desa layak air bersih dan sanitasi****07 Desa yang berenergi bersih dan terbarukan****08 Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa****09 Inovasi dan infrastruktur desa****10 Desa tanpa kesenjangan****11 Kawasan pemukiman desa berkelanjutan****12 Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan****13 Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa****14 Ekosistem laut desa****15 Ekosistem daratan desa****16 Desa damai dan berkeadilan****17 Kemitraan untuk pembangunan desa****18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif**

3. PDP PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

00 Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan

01 Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana

02 Perencanaan Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan

03 Perencanaan Teknis Advokasi dan Kerja Sama

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis advokasi dan kerja sama

04 Perencanaan Teknis Pemanfaatan dan Pengendalian Dana Desa

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

01 Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman

02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Konektivitas

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana konektivitas

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Sosial Budaya

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya

04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

02 Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan

01 Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dan Perlindungan Sosial

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial

- 02 Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Modal Sosial Budaya
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya
 - 03 Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan desa inklusif dan desa adat
 - 04 Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Kebencanaan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan
 - 05 Pengembangan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Sosial Masyarakat
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat
- 03 Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan
- 01 Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan

02 Fasilitasi Pendampingan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendampingan

03 Kerja sama Desa dan Perdesaan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama desa dan perdesaan

04 Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan

04 Fasilitasi dan Pemanfaatan Dana Desa

01 Penyusunan Rencana Prioritas Pemanfaatan dana Desa

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa

02 Penyusunan Rencana Pemanfaatan Dana Desa secara Partisipatif

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif

- 03 Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemanfaatan dana desa
- 04 Pengelolaan Sistem Informasi Dana Desa
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi dana desa

4. PEI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

- 00 Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - 01 Perencanaan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi
 - 02 Perencanaan Teknis Pelayanan Investasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pelayanan investasi
 - 03 Perencanaan Teknis Pengembangan Produk Unggulan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

di bidang perencanaan teknis pengembangan produk unggulan

04 Perencanaan Teknis Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan

01 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

01 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama

02 Pengembangan Badan Pengelola Kawasan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan pengelola kawasan

03 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat

04 Pengembangan Kelembagaan Investasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

- prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan investasi
- 02 Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 01 Pelayanan Informasi Potensi Investasi
- Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi
- 02 Pelayanan Perijinan
- Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan
- 03 Akses Permodalan
- Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akses permodalan
- 04 Pengembangan Kewirausahaan
- Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan
- 03 Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 01 Pengembangan Produk Unggulan
- Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk unggulan

- 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi, dan Pengembangan Teknologi Produk Unggulan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan
- 03 Pengembangan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Produk Unggulan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan
- 04 Pengembangan Pembiayaan Produk Unggulan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pembiayaan produk unggulan
- 04 Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan
 - 01 Pengembangan Strategi Pemasaran
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran
 - 02 Pengembangan Jaringan dan Kerja Sama Pemasaran
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran

- 03 Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk Unggulan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan
 - 04 Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran produk unggulan
 - 05 Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
5. PDT PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- 00 Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
 - 01 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan
 - 02 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

- di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana
- 03 Penyerasian Rencana dan Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
- 04 Penyerasian Rencana dan Program Pembangunan Daerah Khusus
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus
- 01 Penyerasian Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal
- 01 Penyerasian Pembangunan Modal Sosial Dan Kelembagaan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan
- 02 Penyerasian Pembangunan Modal Budaya
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal budaya
- 03 Penyerasian Pembangunan Kesehatan, Gizi Keluarga dan Masyarakat

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat

04 Penyerasian Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah

02 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana

01 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Energi dan Air

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi energi dan air

02 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya dan Kelembagaan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan

03 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

- di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
- 04 Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman, dan Sanitasi Lingkungan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, dan sanitasi lingkungan
- 03 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- 01 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terbarukan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan
- 02 Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Terbarukan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan
- 03 Penyerasian Pengelolaan Kebencanaan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pengelolaan kebencanaan
- 04 Penyerasian Adaptasi Iklim dan Pengelolaan Lingkungan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis

dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan

05 Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus

01 Penyerasian Pembangunan Kawasan Perbatasan

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan

02 Penyerasian Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar

03 Penyerasian Pembangunan Kawasan Strategis

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan strategis

6. PKT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

00 Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

01 Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan Kawasan dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan

- pengembangan kawasan dan rencana detail kawasan perkotaan baru
- 02 Legalisasi Tanah
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang legalisasi tanah
- 03 Penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan rencana teknis pusat satuan kawasan pengembangan
- 04 Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
- 01 Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 01 Pembangunan Satuan Permukiman
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan satuan permukiman
- 02 Pembangunan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

di bidang pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan

03 Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perkotaan baru

04 Evaluasi Kelayakan Permukiman dan Perwujudan Ruang

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang

02 Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

01 Penyiapan Calon Transmigran

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan calon transmigran

02 Mediasi Kerja Sama Antar Daerah dan Persiapan Perpidahan Transmigrasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mediasi kerja sama antar daerah dan persiapan perpidahan transmigrasi

03 Perpindahan dan Penempatan Transmigran

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpindahan dan penempatan transmigran

- 04 Penataan Penduduk Setempat
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penduduk setempat
- 05 Konsolidasi dan Adaptasi Lingkungan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konsolidasi dan adaptasi lingkungan
- 03 Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
 - 01 Pengembangan Sosial Budaya dan Mental Spiritual
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual
 - 02 Pengembangan Usaha dan Kelembagaan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan
 - 03 Pengembangan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum serta Pengelolaan Lingkungan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana, prasarana dan utilitas umum serta pengelolaan lingkungan

- 04 Fasilitasi Pengurusan Hak Atas Tanah
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengurusan hak atas tanah
- 05 Advokasi Pertanahan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi pertanahan
- 04 Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - 01 Pengembangan Masyarakat
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan masyarakat
 - 02 Pengembangan Konektivitas
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan konektivitas
 - 03 Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan
 - 04 Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis

dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi

05 Pengelolaan Aset Kawasan Transmigrasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset kawasan transmigrasi

7. BPI PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

00 Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

01 Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan pembangunan desa dan perdesaan

02 Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi

03 Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal

04 Kebijakan Pembangunan Transmigrasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan,

pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang kebijakan pembangunan transmigrasi

01 Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

01 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi

02 Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan teknologi tepat guna

03 Pengembangan Teknologi Tinggi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan teknologi tinggi

04 Pengembangan teknologi Digital

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan teknologi digital

02 Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

01 Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di

- bidang penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan
- 02 Penyusunan Keterpaduan Rencana Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi
- 03 Penyusunan Keterpaduan Rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal
- 04 Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Transmigrasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi
- 03 Pusat Data dan Informasi Pembangunan desa, Daerah Tertinggal dan transmigrasi
- 01 Pengembangan Sistem Informasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi

- 02 Pengelolaan Teknologi Informasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan teknologi informasi
 - 03 Pengelolaan Data dan Informasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi
 - 04 Pengembangan Kerja Sama Data dan Informasi
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pengembangan, pelaksanaan pengembangan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan di bidang pengembangan kerja sama data dan informasi
8. SDM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
- 00 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - 01 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat pengembangan pemberdayaan masyarakat
 - 02 Pengembangan Sistem dan Model Pemberdayaan Masyarakat
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat

- 03 Pengembangan Sistem Pelayanan Pendampingan Masyarakat
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat
- 01 Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - 01 Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Sumber Daya Manusia
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia
 - 02 Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatihan
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan
 - 03 Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi
 - 04 Pengembangan Kerja Sama Pelatihan
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan
- 02 Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - 01 Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

- pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan
- 02 Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan
- 03 Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pelatih
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih
- 04 Pengembangan Kerja Sama Pelatihan
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan
- 03 Pembinaan Jabatan Fungsional
- 01 Rencana dan Program Pengembangan Jabatan Fungsional
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana dan program pengembangan jabatan fungsional
- 02 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standarisasi kompetensi
- 03 Pengembangan Profesi, Sertifikasi Kelembagaan dan Jabatan Fungsional
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan

pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan profesi, sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional

04 Evaluasi dan Penilaian Jabatan Fungsional

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan pengembangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan penilaian jabatan fungsional

04 Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

01 Perencana dan Program Pengembangan fasilitasi dan pelatihan masyarakat

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi di bidang Perencana dan Program Pengembangan fasilitasi dan pelatihan masyarakat

02 Pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi di bidang pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia

03 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi

Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi di bidang Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan fasilitasi

BAB III
PENUTUP

Demikian Peraturan Menteri ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR